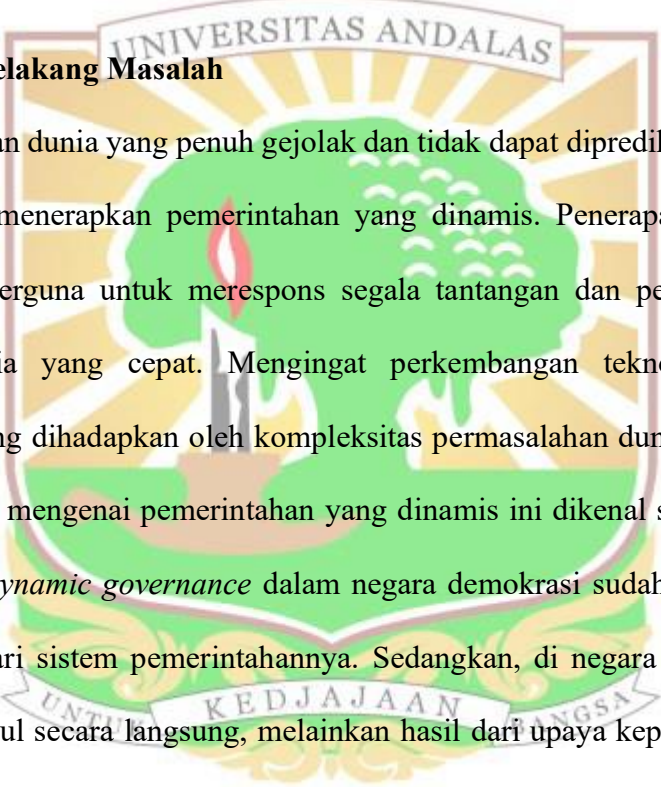


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah



Perubahan dunia yang penuh gejolak dan tidak dapat diprediksi menimbulkan tuntutan untuk menerapkan pemerintahan yang dinamis. Penerapan pemerintahan yang dinamis berguna untuk merespons segala tantangan dan peluang di tengah perubahan dunia yang cepat. Mengingat perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang dihadapkan oleh kompleksitas permasalahan dunia yang semakin banyak. Konsep mengenai pemerintahan yang dinamis ini dikenal sebagai *Dynamic Governance*.¹ *Dynamic governance* dalam negara demokrasi sudah menjadi bagian yang integral dari sistem pemerintahannya. Sedangkan, di negara demokrasi yang baru tidak muncul secara langsung, melainkan hasil dari upaya kepemimpinan yang

¹ Istilah *dynamic governance* sangat populer dalam dunia tata kelola pemerintahan. Bahkan, konsep *dynamic governance* telah terbukti memberikan dampak cukup signifikan bagi institusi pemerintahan yang ingin menerapkannya. Konsep ini pertama kali dipopulerkan lewat penelitian di Singapura oleh Neo dan Chen. Lewat penelitiannya yang berfokus kepada transformasi institusi-institusi pemerintahan yang bekerja di sektor publik Singapura. *Dynamic governance* atau pemerintahan yang dinamis menekankan kepada dinamisme yang dimiliki oleh sebuah lembaga atau institusi pemerintahan. Dinamisme ini bisa terwujud bila adanya kemampuan yang dimiliki oleh aktor (pemerintah, swasta dan masyarakat sipil) dalam merespons perkembangan lingkungan yang tidak menentu. Sehingga dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan sebuah kebijakan dapat menjawab tantangan dan peluang yang dimiliki. Secara umum *dynamic governance* juga sebuah tata kelola dalam pemerintahan yang berorientasi ke depan. Maksudnya di sini adalah penerapan *dynamic governance* berimplikasi kepada perubahan berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang. Sehingga *output* atau luaran dari penerapan konsep ini adalah kebijakan yang adaptif. Bacaan lebih lanjut untuk memahami mengenai konsep *dynamic governance* ini lihat Boon Siong Neo & Geraldine Chen. 2007. *Dynamic Governance: Embedding Culture, Capabilities and Change in Singapore*. Singapore: World Scientific Publishing, hal 1-11

memiliki kapabilitas untuk membangun dan mengembangkan suatu bangsa yang maju agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.²

Dynamic governance menjelaskan mengenai institusi yang dinamis dicirikan dengan adanya *new idea*, persepsi yang *update*, *upgrading* yang berkelanjutan (*sustainability*), aksi-aksi yang cepat, adaptasi yang fleksibel dan inovasi yang kreatif. Institusi semacam ini akan menghasilkan institusi yang selalu belajar, kebijakan yang cepat dan efektif serta perubahan yang berkelanjutan. Aspek utama yang dipenuhi untuk menerapkannya berpedoman kepada elemen di dalam *dynamic governance*. Terdapat tiga elemen di dalam *dynamic governance*, diantaranya: (1) *Thinking Ahead*; (2) *Thinking Again*; dan (3) *Thinking Across*.³ Ketiga elemen ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah *dynamic capabilities*.⁴ *Dynamic capabilities* sebagai kapasitas

² Sehubungan dengan konsep *dynamic governance* yang dipopulerkan dari negara Singapura tentunya memiliki implikasi menyangkut perbedaan dengan negara lainnya. Singapura merupakan negara yang bukan sepenuhnya demokratis. Tentunya kasus ini unik jika dibandingkan dengan beberapa negara demokrasi yang matang seperti Norwegia, Swiss, dan Amerika Serikat. Apalagi jika dibandingkan dengan Indonesia yang masih memiliki patologi di dalam birokrasinya. Pada umumnya, *dynamic governance* memang sudah menjadi bagian yang integral bagi negara yang sepenuhnya demokratis. Akan tetapi, bagi negara yang masih beranjak ke demokrasi atau demokrasi yang baru tentunya membutuhkan sebuah proses. Mengingat bahwa *dynamic governance* harus disesuaikan dengan kultur dan karakteristik negara yang menerapkan. Penjelasan lebih lanjut lihat Azhar Kasim, dkk. 2015. *Merekonstruksi Indonesia: Sebuah Perjalanan Menuju Dynamic Governance*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hal 28

³ Hasil yang ingin dicapai oleh *dynamic governance* adalah kebijakan adaptif dapat di eksekusi atau diimplementasikan. Tentunya tiga elemen yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* menjadi syarat utama untuk dapat mewujudkan tujuan dari *dynamic governance*. *Thinking ahead* atau berpikir ke depan yaitu kapabilitas untuk melihat perkiraan awal perkembangan masa depan yang dapat mempengaruhi suatu bangsa agar tetap relevan dengan dunia. *Thinking again* atau berpikir kembali berarti kapabilitas untuk memikirkan kembali dan membuat lagi kebijakan yang dapat berfungsi sekarang, sehingga mereka dapat melakukan hal yang lebih baik. *Thinking across* atau berpikir ke samping berarti kemampuan dan keterbukaan untuk menyeberang batas-batas untuk belajar dari pengalaman orang lain, sehingga gagasan dan konsepsi baru dapat diperkenalkan ke suatu institusi. Penjelasan lebih lanjut lihat Neo & Chen dalam Abu Huraerah. 2019. *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance*. Bandung: Nuansa Cendekia, hal 72.

⁴ Konsep *dynamic capabilities* memiliki arti penting jika dikaitkan dengan fakta adanya kompleksitas permasalahan yang semakin bertambah berkaitan dengan adanya interaksi antara kebijakan dengan lingkungan, khususnya berkaitan dengan masalah ketidakpastian masa depan (*future uncertainties*) dan *external practices*. Perubahan lingkungan tersebut mendorong lahirnya *adaptive policy* yang bukan hanya merupakan reaksi pasif pada tekanan eksternal, tetapi juga pendekatan proaktif pada inovasi,

suatu institusi dalam mengubah rutinitas dan sumber daya atau kemampuan utama untuk beradaptasi pada perubahan teknologi dan lingkungan yang tidak menentu. Untuk dapat mewujudkan *dynamic capabilities* membutuhkan dua aspek utama yaitu *able people* dan *agile process*.⁵

Dynamic governance adalah *outcome* yang diharapkan, terwujud ketika kebijakan-kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*) dapat dieksekusi. Adaptasi atas kebijakan ini dilakukan secara aktif dan proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan *dynamic governance* adalah landasan nilai budaya (*institutional culture*) yang dimiliki suatu bangsa. Nilai budaya ini yang pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku dan sikap. Tiga kapabilitas dinamis, yaitu *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* akan memfasilitasi kebijakan-kebijakan yang adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi serta proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari institusi dan lembaga pemerintahan. Sehingga mereka senantiasa selalu belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan yang terus terjadi.⁶

kontekstualisasi, dan eksekusi. Ide-ide ini yang akan menghasilkan kebijakan yang dibuat sesuai dengan konteks (*adaptive policy*) yang selanjutnya diharapkan dapat diimplementasikan, sehingga hal ini dapat mengubah *dynamic governance* mewujudkan sebuah realita, ibid, hal 79

⁵ Untuk menerapkan *dynamic capabilities* dalam melakukan perubahan ini ada pada manusia yang ada di dalam organisasi, terutama pimpinan sektor publik. Individu memiliki kapasitas lahiriah untuk berpikir sesuai dengan penerapan dalam elemen *dynamic governance*. Selain keberadaan individu yang memiliki kapasitas dalam berpikir yang mempunyai, hal tersebut juga ditentukan oleh proses yang baik. *Agile process* juga menentukan kualitas dari kebijakan yang dibuat. Sehingga perpaduan antara keberadaan sumber daya manusia dengan proses yang baik akan menentukan kualitas dari kebijakan yang akan diterapkan. Ibid, hal 82

⁶ Rahmatunnisa, M. (2019). DIALEKTIKA KONSEP DYNAMIC GOVERNANCE. *Jurnal Academia Praja* : *Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan*, 2(02). <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jap.v2i02.116>

Dynamic governance menghasilkan sebuah kapabilitas strategis yang wajib dimiliki oleh pemerintah di berbagai negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat merespons-nya secara lebih efektif dan efisien. *Dynamic governance* menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah yang adaptif dan responsif terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya pemerintah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.⁷

Tantangan dan peluang di tengah perubahan dunia yang sangat cepat membuat pemerintah harus segera menyesuaikan kebijakan dan keputusannya agar tidak ketinggalan zaman. Perubahan yang ada bukan hanya dirasakan oleh negara maju, namun negara berkembang seperti Indonesia juga ikut merasakan dampak perubahan tersebut. Indonesia merupakan negara besar yang saat ini memiliki 38 provinsi. Perubahan yang begitu cepat sudah mulai dirasakan sampai ke daerah-daerah di Indonesia. Mengingat luas daerah yang begitu besar sudah menjadi tuntutan bagi pemerintah untuk menghadirkan pemerintahan yang dinamis dan adaptif.⁸

Tuntutan ini bukan hanya bagi pemerintah pusat saja, melainkan juga pemerintah yang ada di daerah untuk mencari solusi bagi perkembangan daerahnya masing-masing. Perubahan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

⁷ *Ibid*, 12

⁸ Untuk bacaan lebih lanjut mengenai urgensi penerapan *dynamic governance* bagi pemerintah daerah lihat <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/pemda-diminta-terapkan-dynamic-government> diakses pada Senin, 6 Januari 2025 Jam 10:41 WIB.

dari sentralisasi ke desentralisasi pada reformasi 1998 menjadi titik awal bagi Indonesia dalam demokratisasi. Banyak tuntutan yang harus diimplementasikan di Indonesia, salah satunya mengenai pemerintahan yang baik dan bersih dalam skala pusat maupun daerah. Khusus untuk daerah, dituntut adanya pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya.⁹

Pelaksanaan otonomi daerah ini mewajibkan pemerintah daerah untuk menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Tata kelola pemerintahan yang baik harus terus dinamis agar dapat mengikuti perubahan lingkungan baik eksternal maupun internal. Pada saat ini pemerintah daerah menerapkan aspek *dynamic capabilities*. *Dynamic capabilities* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya dapat terlaksana jika menerapkan tiga elemen dalam *dynamic governance*. Sehingga harapan akan adanya realisasi dalam pemerintahan daerah yang dinamis dan adaptif dapat terselenggara dengan baik. Terdapat beberapa temuan mengenai penerapan *dynamic governance* di beberapa daerah di Indonesia. Keberadaan daerah seperti Kota Surabaya, Kota Tarakan, dan Kabupaten Jember menjadi bukti yang dapat dicontoh dalam menerapkan konsep *dynamic governance*. Melalui perubahan dalam pelayanan publik, berbagai transformasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan kebijakan-kebijakan yang adaptif terbukti dapat memberikan insentif positif bagi daerahnya masing-masing.¹⁰

⁹ Bacaan lebih lanjut mengenai dinamika desentralisasi di Indonesia terutama pasca reformasi lihat Sadu Wasistiono & Petrus Polyando. 2017. *Politik Desentralisasi di Indonesia*. Bandung: IPDN Press, hal 322-481

¹⁰ Untuk lebih jelasnya mengenai kasus-kasus dalam penerapan *dynamic governance* di Kota Surabaya, Kota Tarakan, dan Kabupaten Jember termasuk pengalaman dan apa saja yang mereka lakukan silakan rujuk loc.cit. Azhar Kasim, dkk, hal 88

Menindaklanjuti berbagai contoh kasus dari beberapa daerah di Indonesia di atas, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai *dynamic governance*. Beberapa penelitian terdahulu tidak banyak mengkaji mengenai transformasi kebijakan suatu daerah untuk menetapkan keberlanjutan pembangunan. Penelitian terdahulu lebih banyak melihat kepada aspek pelayanan publik yang dikaitkan dengan penerapan prinsip-prinsip di dalam *dynamic governance*, seperti penelitian Alifatu Lela Mazidah, dkk (2019) dengan judul “Analisis *Dynamic Governance* Para Program Pelayanan Layad Rawat di Dinas Kesehatan Kota Bandung”. Penelitian oleh Khairul Ikhsan, dkk (2020) yang berjudul “Implementasi *Dynamic Governance* dalam Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Batam” lebih menekankan implementasi *dynamic governance* yang dihubungkan dengan penyelenggaraan sebuah mal pelayanan publik. Penelitian Amalia Ilmia Sari dan Zaili Rusli (2023) yang berjudul “Tata kelola Pemerintahan Dinamis (*Dynamic Governance*) dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru” lebih menekankan juga pada penerapan dari *dynamic governance* dalam sebuah pelayanan publik pada instansi di daerah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Komang Jaka Ferdian, dkk (2021) dengan judul “Birokrasi, Disrupsi, dan Anak Muda: Mendorong Birokrat Muda menciptakan *Dynamic Governance*” penelitian ini menekankan kepada aspek inovasi dalam *dynamic governance*. Keberadaan anak muda dalam suatu pemerintahan telah memberikan semacam perubahan bagi birokrasi dengan menerapkan prinsip di dalam *dynamic governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Fipin Indera Yani, dkk (2023) yang berjudul “Kontekstualisasi Reformasi Birokrasi Aspek Kultural Pemerintah

Kabupaten Kutai Kartanegara: Perspektif *Dynamic Governance*” menekankan kepada pelaksanaan reformasi birokrasi daerah menggunakan perspektif *dynamic governance*. Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Martoyo dan Nahot Tua Parlindungan Sihaloho, (2021) yang berjudul “Elemen Sukses Penerapan *Dynamic Governance* di Provinsi Jawa Barat” menekankan kepada beberapa elemen dalam pemerintahan provinsi yang sebagai bentuk penerapan dari *dynamic governance*.

Penelitian-penelitian terdahulu di atas lebih banyak menekankan kepada aspek pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Akan tetapi, penelitian yang berfokus kepada transformasi kebijakan suatu pemerintahan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan jarang mendapat perhatian. Fenomena ini menarik untuk dilihat lebih jauh mengenai perubahan kebijakan yang bersumber dari perubahan lingkungan dan tuntutan zaman. Ketika terjadi perubahan secara masif di suatu daerah dan membuat pemerintah daerah untuk memikirkan ulang mengenai arah pembangunan.¹¹

Sehubungan dengan itu, Neo dan Chen, (2007) mengatakan bahwa *dynamic governance* memuat pilihan mengenai regulasi, kebijakan, institusi, dan struktur yang dihasilkan secara kolektif. Sehingga memberikan insentif dan peluang sosio-ekonomi untuk berbagai aktivitas. Tata kelola tersebut menjadi dinamis saat pilihan kebijakan sebelumnya dapat disesuaikan dengan perkembangan saat ini dalam lingkungan yang

¹¹ Jika ditelusuri lebih lanjut mengenai *Dynamic Governance* secara menyeluruh, Neo & Chen menekankan bahwa hasil dari penerapan setiap elemen dari *dynamic governance* mengarah kepada kebijakan adaptif. Kebijakan adaptif ini tidak dapat dicapai jika tidak melibatkan berbagai komponen lain seperti proses yang baik dan keberadaan orang-orang tangkas. Proses dalam mencapai *dynamic governance* diperlukan proses belajar terus menerus dengan memanfaatkan kapabilitas dan kultur. Muara atau akhir dari penerapan *dynamic governance* adalah transformasi sebuah kebijakan Neo & Chen, op.cit, 13.

tidak menentu dan cepat berubah. Sehingga kebijakan dan lembaga tetap relevan dan efektif dalam mencapai hasil jangka panjang yang diinginkan masyarakat. Hal ini lebih dari sekedar membuat perubahan yang hanya sekali atau keluar dari kemunduran. Ini adalah tentang perubahan yang sifatnya berkelanjutan untuk kelangsungan hidup dan kesejahteraan jangka panjang.

Akan tetapi seiring berjalannya waktu konsep *dynamic governance* mendapatkan tantangan dan kritikan. Mengusung konsep dengan dilatar belakangi tata kelola pemerintahan Singapura, tentunya juga memiliki implikasi terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan di luar konteks negara tersebut. Terutama jika konsep ini dilandaskan dengan praktik-praktik patologi birokrasi yang lazim dilakukan di dalam negara-negara berkembang.¹² Salah satu terobosan penelitian mengusung konsep *multilevel dynamic governance*. Penelitian ini mengkombinasikan mengenai konsep *multilevel governance* dan *dynamic governance*.¹³ Kombinasi antara dua konsep ini yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi pada studi kasus

¹² Uraian lebih lanjut mengenai konsep dan kelemahan di dalam *dynamic governance* rujuk Andhika. 2017. Evolusi Konsep Tata Kelola Pemerintah: *Sound Governance, Dynamic Governance* dan *Open Government*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 8, No. 2, hal 87-102

¹³ Penelitian ini berfokus pada penanganan Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung di Indonesia. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, kontribusi kebaruan yang diberikan oleh penelitian ini adalah penggunaan pendekatan *multilevel governance* dan *dynamic governance* dalam konteks penanganan krisis pandemi COVID-19. Meskipun pendekatan *multilevel governance* telah banyak digunakan dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, namun penggunaannya dalam penanganan pandemi Covid-19 masih perlu ditingkatkan. Selain itu, pendekatan *dynamic governance* juga merupakan konsep yang sangat relevan dalam membantu pemerintah untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat selama pandemi. Oleh karena itu, penggunaan kedua pendekatan tersebut dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan gambaran tentang bagaimana koordinasi dan adaptasi kebijakan yang dinamis dapat membantu penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah dan peneliti dalam menyusun strategi penanganan pandemi Covid-19 di daerah lain di Indonesia dan negara lain yang mengalami situasi serupa di masa mendatang. Selain itu, kontribusi kebaruan yang diberikan oleh penelitian ini adalah penggunaan pendekatan *multilevel governance* dan *dynamic governance* dalam konteks penanganan krisis pandemi COVID-19. Robi Cahyadi Kurniawan, Dodi Faedlulloh, Arizka Warganegara & Dedy Hermawan (2023) Multilevel dynamic governance in dealing with crisis: the case of handling corona virus disease 19 (COVID-19) in Lampung Province, Indonesia, *Cogent Social Sciences*, 9:1, 2222574, DOI: 10.1080/23311886.2023.2222574

penelitian. Mengingat konsep *dynamic governance* yang mencakup segala lini dalam tata kelola pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan paduan atau kombinasi beberapa konsep yang cocok untuk meninjau dan membandingkan penerapan dari *dynamic governance* tersebut.

Penelitian ini lahir dari fenomena yang sering dijumpai oleh peneliti ketika melihat perubahan lingkungan dan sumber daya alam suatu daerah berubah drastis. Sehingga yang sebelumnya daerah tersebut memanfaatkan hasil sumber daya alam berupa hasil pertambangan, berubah menjadi pemanfaatan lahan bekas tambang menjadi pengembangan objek kepariwisataan berkelanjutan.¹⁴ Tentunya keberlanjutan pembangunan yang ada di daerah ini berasal dari transformasi sebuah kebijakan. Adapun kelebihan dari penelitian ini peneliti mencoba melihat kepada sudut pandang yang baru mengenai transformasi kebijakan suatu daerah dalam menentukan keberlanjutan pembangunan yang ada di Kota Sawahlunto.¹⁵ Kota Sawahlunto terkenal dengan kota bersejarah yang berkembang dari komoditas pertambangan batu bara. Sekarang, Kota Sawahlunto telah bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Mengedepankan

¹⁴ Salah satu fokus penelitian yang menarik mengenai kepariwisataan adalah kepariwisataan berkelanjutan khususnya pariwisata pasca tambang. Keberadaan tambang sebagai objek pariwisata masa lalu sudah banyak dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan edukasi. Kombinasi antara rekreasi dan edukasi tersebut yang menjawab dimensi dari kepariwisataan berkelanjutan. Bukan hanya pada sisi keberlanjutan mengenai income yang didapatkan, melainkan juga menjadi bahan pertimbangan baik secara lingkungan, budaya dan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Untuk bacaan lebih lanjut lihat Cole (2004) Exploring the Sustainability of Mining Heritage Tourism, *Journal of Sustainable Tourism*, 12:6, 480-494, DOI: 10.1080/09669580408667250

¹⁵ Studi awal mengenai transformasi Kota Sawahlunto telah dilakukan oleh Delmira Syafrini. Melihat kepada transformasi sosial budaya dan ancaman menjadi kota hantu. Transformasi yang dilakukan mulai dari keterpurukan sampai menjadi kota yang memanfaatkan warisan tambang sebagai objek pariwisata. Uraian lebih lanjut lihat Delmira Syafrini, Muhamad Fadhil Nuridin, Yogi Suprayogi Sugandi & Alfian Miko (2021): Transformation of a Coal Mining City into a Cultured Mining Heritage Tourism City in Sawahlunto, Indonesia: A Response to the Threat of Becoming a Ghost Town, *Tourism Planning & Development*, DOI: 10.1080/21568316.2020.1866653

kepariwisataan berkelanjutan dan mengkombinasikan dengan kebudayaan yang dimiliki.¹⁶

Selain itu kajian mengenai pembangunan atau pengembangan kota-kota pasca tambang telah banyak dilakukan. Reklamasi lahan bekas pertambangan dan mencari alternatif lain yang cocok untuk dikembangkan. Pembangunan kota pasca tambang ini merujuk kepada pemanfaatan lahan bekas tambang untuk dapat digunakan semaksimal mungkin. Tujuannya tidak lain untuk pembangunan berkelanjutan di kota tersebut. merujuk kepada penelitian yang dilakukan oleh Dian Permata Sari & Imam Buchori (2015) yang mencoba menelusuri mengenai reklamasi lahan bekas pertambangan timah di Bangka Belitung. Untuk menjawab tantangan lingkungan yang tengah dihadapi, berbagai strategi mulai dari reklamasi dan revegetasi dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan.¹⁷ Begitu juga dengan penelitian di Gunkanjima, Jepang. Hashimoto & Telfer (2015) juga menyoroiti mengenai pulau tambang batu bara menjadi situs wisata warisan industri modern di Jepang ini. Berbagai inovasi pengembangan juga dilakukan untuk menerapkan kepariwisataan di bekas lahan pertambangan batu bara.¹⁸ Kasus ini memiliki kesamaan bentuk dengan Kota Sawahlunto sebagai kota pasca tambang.

¹⁶ Delmira Syafrini, Muhamad Fadhil Nurdin, Yogi Suprayogi Sugandi & Alfian Miko (2020): The impact of multiethnic cultural tourism in an Indonesian former mining city, *Tourism Recreation Research*, DOI: 10.1080/02508281.2020.1757208

¹⁷ Untuk lebih jelasnya bagaimana strategi yang dilakukan oleh PT.Timah untuk mereklamasi lahan bekas tambang timah di Bangka Belitung rujuk Dian Permata Sari & Imam Buchori. 2015. Efektivitas Program Reklamasi Pasca Tambang Timah Di Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*. Volume 11 (3): 299-312

¹⁸ Bacaan lebih lanjut mengenai studi kasus pengembangan kepariwisataan dengan memanfaatkan lahan bekas tambang di sebuah pulau di Jepang ini rujuk Atsuko Hashimoto & David J. Telfer (2016): Transformation of Gunkanjima (Battleship Island): from a coalmine island to a modern industrial heritage tourism site in Japan, *Journal of Heritage Tourism*, DOI: 10.1080/1743873X.2016.1151884

Kota Sawahlunto bertransformasi ketika dihentikannya proses operasional penambangan batu bara oleh PT. Bukit Asam Tbk. Sejak saat itu, pada tahun 1999 Sawahlunto menghadapi resesi ekonomi yang sangat mengguncangkan. Sehingga membuat pemerintah daerah untuk memikirkan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui proses panjang dan musyawarah dengan seluruh *stakeholders* kota pada akhirnya membuahkan sebuah peraturan daerah. Peraturan Daerah (Perda) Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi Misi Kota merupakan *prototipe* dari transformasi kebijakan dan pembangunan berkelanjutan.¹⁹

Peraturan daerah ini mencanangkan Kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Setelah melalui proses panjang, sebelum tahun 2020 yaitu pada 6 Juli 2019 Sawahlunto menjadi salah satu kota warisan dunia (*world heritage*) dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).²⁰ Atas dasar fenomena transformasi kebijakan Kota Sawahlunto tersebut, peneliti akan mencoba melihat menggunakan konsep *dynamic governance*. Peneliti akan mengkaji secara komprehensif dan mendalam mengenai

¹⁹ Perda Kota Sawahlunto Nomor 02 tahun 2001 tentang Visi Kota dapat dilihat dalam peraturan tersebut. menargetkan kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Sebagai tindak lanjutnya juga di akomodir di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Sawahlunto tahun 2005-2025. Untuk melihat lebih lanjut silakan lihat RPJPD Kota Sawahlunto tersebut. di dalam RPJPD 2005-2025 juga terdapat *time line* dari eksekusi PerdaNo. 2 Tahun 2001. Sehingga arah fokus pembangunan berkelanjutan Kota Sawahlunto diarahkan untuk implementasi kebijakan kota pasca tambang. Lihat Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Kota Sawahlunto 2005-2025.

²⁰ Kota Sawahlunto merupakan kota yang telah melalui proses panjang mengenai arah pembangunan kota. Kota yang bertransformasi secara besar-besaran ini telah melahirkan sebuah kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang visi dan misi kota merupakan landasan awal. Visi dan misi yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut juga di akomodir lewat Rencana Pembangunan jangka Panjang Kota Sawahlunto 2005-2025. Mengenai penjelasan lebih lanjut tentang implementasi kebijakan ini lihat Novendra Hidayat. 2016. Implementasi Kebijakan Pasca Tambang di Kota Sawahlunto. *Journal Society*, No. 1-25.

transformasi kebijakan sebagai wujud penerapan *dynamic governance* di Kota Sawahlunto.

Argumen dasar peneliti menggunakan konsep *dynamic governance* merupakan tinjauan lebih lanjut mengenai konsep tersebut. Berkaca kepada penelitian terdahulu yang telah dijabarkan di atas, maka peneliti memberikan sebuah kebaruan dalam penelitian ilmiah dari *dynamic governance*. Hasil akhir dari *dynamic governance* bukan hanya berupa pelayanan dalam sektor publik, melainkan juga menghadirkan transformasi kebijakan. Untuk uraian dan kombinasi yang lebih spesifik peneliti juga melihat menggunakan perspektif kepariwisataan berkelanjutan yang ada di Kota Sawahlunto. Sehingga hasil yang didapatkan selain melihat lebih lanjut konsep *dynamic governance* dalam hal ini aspek transformasi kebijakan. Tetapi juga dimensi di dalam kepariwisataan berkelanjutan kota pasca tambang yang ada di Kota Sawahlunto. Penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan pada rumusan masalah di bawah ini.

1.2 Rumusan Masalah

Sawahlunto merupakan kota yang tumbuh dan berkembang karena pertambangan batu bara.²¹ Berdasarkan pada *Stadsblaad Van Nederlansch Indie* pada

²¹Setelah ditemukannya Batu bara Sawahlunto oleh seorang geolog Belanda bernama Ir. W.H.De Greve pada tahun 1867, Sawahlunto menjadi pusat perhatian Belanda kala itu. Pada tanggal 1 Desember 1888 ditetapkan keputusan tentang batas-batas ibukota atau *Afdealing* yang ada di Sumatera Barat. Oleh karena itu pada tanggal 1 Desember 1888 dapat dikatakan bahwa Sawahlunto mulai diakui keberadaannya dalam administrasi pemerintahan Hindia Belanda sebagai bagian dari wilayah *Afdealing* Tanah Datar pada masa itu. Batubara mengantarkan Sawahlunto sebagai catatan penting pemerintah Hindia Belanda pembukaan tambang batu bara Sawahlunto tahun 1891 merupakan aset terpenting bagi pemerintah Kolonial Belanda. Hal ini disebabkan oleh tingginya permintaan dunia akan batu bara sebagai sumber energi di abad penemuan mesin uap di Eropa Barat. Mengingat cadangan batu bara yang diperkirakan mencapai angka 205 juta ton. Usaha penambangan batu bara ini mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1920-1921, pada waktu itu jumlah pekerja mencapai ribuan orang, selain itu ada hampir seratus orang Belanda atau Indo yang menjadi pimpinan perusahaan, ahli, dan

tahun 1918, otoritas pemerintahan kota dilakukan oleh *Stadesgemeenteraad* (DPRD) dan *Burgemeester* (Wali kota). Setelah satu abad lebih lamanya batu bara sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbarui itu semakin menipis. Berdasarkan kondisi di atas, pemerintah kota bersama *stakeholders* terus mencari alternatif lain sehingga kota Sawahlunto tidak menjadi kota mati (*ghost city*). Pemerintah beserta elemen masyarakat kota Sawahlunto telah merancang strategi lain yaitu dengan menjadikan kota Sawahlunto sebagai kota wisata yang berbudaya. Kota wisata yang dimaksud dengan mengemukakan dua potensi wisata yang menjadi kekuatannya, wisata tambang Kolonial dan wisata sejarah kota.²²

Saat ini Sawahlunto berkembang menjadi kota wisata tua yang multietnis, sehingga menjadi salah satu kota tua yang cukup terkenal di Indonesia. Kota yang terkenal dengan ragam budaya dan suku, yang memperingati ulang tahun pada tanggal 1 Desember. Di Kota Sawahlunto banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan kolonial Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah setempat dalam rangka mendorong kepariwisataan kota. Tujuan utamanya yaitu mencanangkan Sawahlunto menjadi “Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya Tahun 2020”. Selain itu wisata tambang dan peninggalan kebudayaan yang dikenal sebagai batu bara Ombilin Sawahlunto telah secara resmi ditetapkan (UNESCO) sebagai warisan dunia.²³

staf kunci lainnya untuk bacaan lebih lanjut lihat GB Suprayoga. 2018. Identitas Kota Sawahlunto Paska Kejayaan Pertambangan Batu Bara. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol. 19/ No.2

²²Sejarah Kota Sawahlunto, <https://portal.sawahluntokota.go.id/sejarah-kota-sawahlunto/> diakses pada 3 mei 2024 jam 09:14 WIB

²³ UNESCO Tetapkan Sawahlunto Sebagai Warisan Dunia, <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/dpk/sawahlunto-ditetapkan-menjadi-warisan-dunia/>

Grand desain mengenai transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto ditegaskan melalui Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang visi dan misi Kota Sawahlunto. Sebagai visinya "*Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya*". Selanjutnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023, adalah rencana pelaksanaan tahap keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, di mana visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto adalah "*Sawahlunto Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya pada tahun 2020*".²⁴

Untuk dapat mewujudkan visi tersebut, RPJPD Kota Sawahlunto telah menetapkan 4 misi utama pembangunan daerah jangka Panjang, diantaranya; Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat di tengah-tengah masyarakat; 2) Meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum; 3) Mengembangkan objek wisata tambang; 4) Mengembangkan seluruh potensi kota yang dapat mendorong berkembangnya pariwisata. Visi dan Misi kepala daerah terpilih pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018-2023 adalah : "*Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Wisata yang Kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera*".²⁵

Berdasarkan RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2005-2025 merupakan pedoman bagi pemerintah dan seluruh *stakeholders* terkait untuk dapat diperhatikan dan

²⁴ Lihat lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025.

²⁵ Mengenai Visi dan Misi, isu strategis daerah dan arah pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan ketetapan RPJP 2005-2025 serta tujuan silakan akses Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto (RPJM) 2018-2023

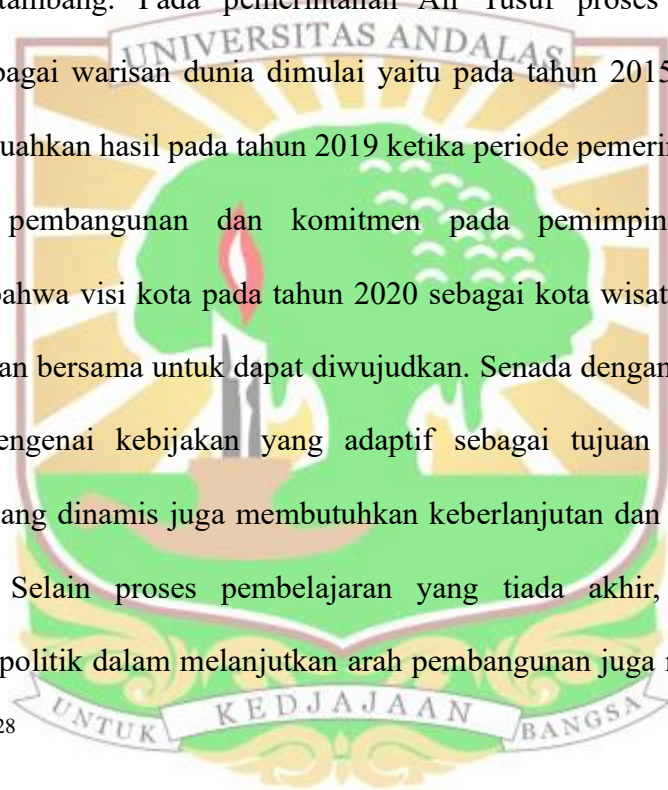
diimplementasikan. Visi pembangunan jangka panjang ini pada dasarnya merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu dua puluh tahun. Visi ini tentunya merujuk kepada Perda Nomor 02 Tahun 2001 tentang visi dan misi kota yaitu Sawahlunto tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Suatu keadaan pada tahun 2020 Kota Sawahlunto sudah menjelma menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dan karakteristik tambang, wisata rekreasi dan wisata lainnya. Di samping itu, tata kehidupan masyarakat Kota Sawahlunto diwarnai oleh budaya asli Minangkabau serta pembauran budaya lain yang harmonis. Pada tahun 2025 Kota Sawahlunto selain dikenal sebagai kota wisata juga identik dengan kota yang nyaman untuk dihuni dan menarik untuk dikunjungi.²⁶

Rentang tahun 2005-2025 tersebut setidaknya sudah ada 3 Wali kota yang telah memimpin di Kota Sawahlunto. Periode tahun 2003-2013, Kota Sawahlunto dipimpin oleh Amran Nur, periode 2013-2018 dipimpin oleh Ali Yusuf dan periode 2018-2023 dipimpin oleh Deri Asta. Tahun 2023-sampai saat ini dipimpin oleh pejabat yaitu Fauzan Hasan. Periode bangkitnya Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang terjadi ketika Amran Nur yang dinilai sebagai peletak dasar

²⁶ Jika dilihat lebih runut mengenai time line atau garis waktu yang telah ditetapkan di dalam RPJPD Kota Sawahlunto, terdapat dua hal yang perlu untuk di garis bawahi. Visi Kota Sawahlunto telah disebutkan bahwa pada tahun 2020 menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Berdasarkan penjabaran dari target waktu tersebut dan disesuaikan dengan format RPJPD 2005-2025, maka terdapat penjabaran sebagai berikut; pertama Sawahlunto sebagai kota wisata tambang, dan yang kedua Sawahlunto sebagai kota yang berbudaya. Tujuan dua aspek itu pada rentang tahun 2005-2020 adalah masyarakat Kota Sawahlunto dipengaruhi oleh aktivitas pariwisata dengan karakteristik tambang. Untuk dapat melengkapi hal tersebut diperlukan keberadaan masyarakat yang dipengaruhi oleh pembauran berbagai kebudayaan yang ada di Kota Sawahlunto. Oleh sebab itu, rentang tahun 2020-2025 akan tercapai tujuan akhir dari RPJPD 2005-2025 yaitu selain dikenal sebagai kota wisata tambang, Sawahlunto juga identik dengan kota yang nyaman untuk dihuni dan menarik untuk dikunjungi.

pengembangan kepariwisataan kota ini. Perubahan demi perubahan sebagai bentuk komitmen terhadap arah keberlanjutan pembangunan kota menjadikan Amran Nur sebagai tokoh yang sangat berjasa.²⁷

Ketika rezim pemerintahan Amran Nur berakhir digantikan oleh Ali Yusuf arah pembangunan Kota Sawahlunto masih terus berfokus kepada pengembangan objek wisata tambang. Pada pemerintahan Ali Yusuf proses persiapan Kota Sawahlunto sebagai warisan dunia dimulai yaitu pada tahun 2015. Usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2019 ketika periode pemerintahan Deri Asta. Keberlanjutan pembangunan dan komitmen pada pemimpin tersebut telah membuktikan bahwa visi kota pada tahun 2020 sebagai kota wisata tambang sudah menjadi pedoman bersama untuk dapat diwujudkan. Senada dengan konsep *dynamic governance* mengenai kebijakan yang adaptif sebagai tujuan dari tata kelola pemerintahan yang dinamis juga membutuhkan keberlanjutan dan keberlangsungan pembangunan. Selain proses pembelajaran yang tiada akhir, komitmen dari kepemimpinan politik dalam melanjutkan arah pembangunan juga menjadi hal yang sangat penting.²⁸

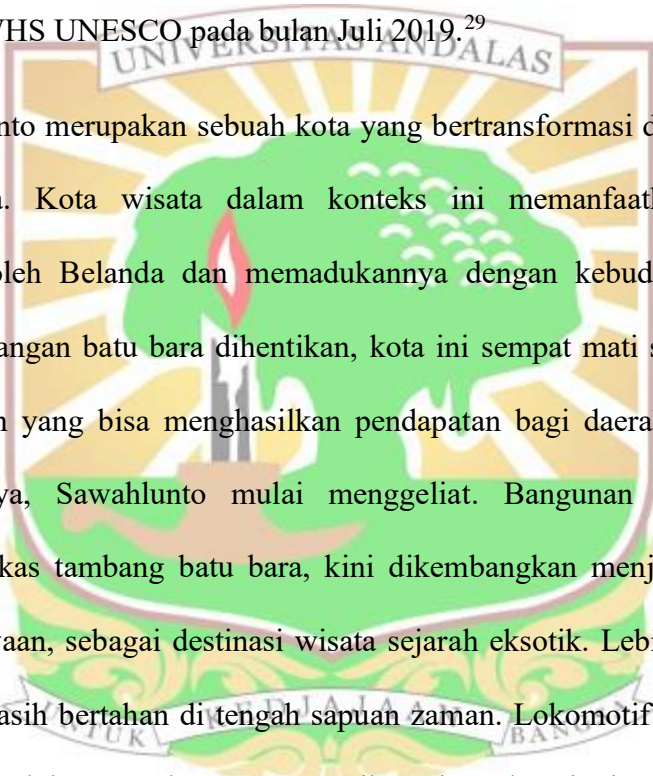


Kota Tua Tambang Batubara Sawahlunto terdaftar dalam daftar tentatif *World Heritage Site* (WHS) UNESCO pada 30 Januari 2015, dalam kategori kekayaan budaya. Kota ini dinominasikan untuk menunjukkan inovasi teknologi pertambangan batu bara, prestasi pendidikan, dan pertukaran budaya. Pemerintah pusat Indonesia memimpin upaya ini, sementara bantuan teknis diberikan oleh Komite Ilmiah

²⁷ <https://padek.jawapos.com/features/2363767479/mengenang-amran-nur-jejak-yang-tak-terlupakan-dari-warisan-tambang-berbudaya> diakses pada Kamis, 8 Agustus 2024 Jam 10:33 WIB

²⁸ Neo & Chen, Loc.cit, hal 189

Internasional International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), para anggotanya, dan para ahli independen. Tim evaluasi teknis ICOMOS mengunjungi properti tersebut pada tanggal 3–7 September 2018. Pada tanggal 13 Maret 2019, tim tersebut menerbitkan laporan evaluasi yang menyetujui nominasi untuk diserahkan ke Rapat Komite WHS UNESCO pada bulan Juli 2019.²⁹



Sawahlunto merupakan sebuah kota yang bertransformasi dari kota tambang ke kota wisata. Kota wisata dalam konteks ini memanfaatkan peninggalan pertambangan oleh Belanda dan memadukannya dengan kebudayaan yang ada. Setelah penambangan batu bara dihentikan, kota ini sempat mati suri, karena tidak ada lagi andalan yang bisa menghasilkan pendapatan bagi daerah. Namun dalam perkembangannya, Sawahlunto mulai menggeliat. Bangunan tua peninggalan Belanda dan bekas tambang batu bara, kini dikembangkan menjadi museum dan gedung kebudayaan, sebagai destinasi wisata sejarah eksotik. Lebih dari 100 objek cagar budaya masih bertahan di tengah sapuan zaman. Lokomotif uap, terowongan kereta api, hingga lubang tambang yang masih tersisa sebagai wisata berbilang masa. Salah satu yang terkenal adalah peninggalan tambang batu bara Ombilin. Pada tahun 2019 lalu, jejak fisik aktivitas penambangan batu bara ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO. Inilah warisan budaya kelima di

²⁹ Aspek penting dalam transformasi kebijakan yang terjadi di Sawahlunto adalah komitmen terhadap kepariwisataan berkelanjutan (*sustainable tourism*). Sebagaimana telah diketahui dalam Perda 02 tahun 2001 dan RPJPD 2005-2025 arah pembangunan Kota Sawahlunto berfokus kepada implementasi kota wisata tambang yang berbudaya. Untuk menjaga komitmen tersebut diperlukan eksekusi kebijakan seperti halnya yang terdapat dalam *dynamic governance*. Maka mulai tahun 2003 sampai Kota Sawahlunto ditetapkan sebagai salah satu kota Warisan dunia oleh UNESCO sudah ada proses *continuu* tersebut. proses tersebut dimulai dari skala kota berupa kebijakan, sampai kepada skala internasional di UNESCO. Semua itu dilalui tahap demi tahap untuk dapat mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan tersebut. untuk dapat melihat lebih jauh silakan rujuk <https://travel.kompas.com/read/2019/07/07/110600927/mengapa-tambang-batubara-ombilin-sawahlunto-terpilih-jadi-warisan-dunia> diakses pada Senin 6 Januari 2025, jam 15:16 WIB.

Indonesia, dan pertama di Sumatera, yang diakui UNESCO. Pengakuan itu dicetuskan dalam sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO PBB di Baku, Azerbaijan pada Sabtu, 6 Juli 2019.³⁰

Berdasarkan RPJMD kota Sawahlunto periode 2018-2023 melihat kepada aspek permasalahan dan isu strategis daerah terutama pada sektor pariwisata masih belum memberikan dampak yang signifikan bagi keuangan daerah. Mengingat masih rendahnya kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB serta terhadap PAD. Permasalahan dalam hal ini belum optimalnya pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto sehingga kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto belum memberikan *multiplier* efek yang besar terhadap ekonomi daerah.³¹ Kunjungan ke Objek wisata tidak dibarengi oleh meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat, baik untuk berbelanja maupun untuk menginap di Kota Sawahlunto. Kunjungan ke Kota Sawahlunto masih sebatas kunjungan ke Objek Wisata, belum mengharuskan pengunjung untuk menginap di Kota Sawahlunto. Potensi ini sebetulnya terjawab jika pengelolaan pariwisata di Kota Sawahlunto mampu mengedepankan potensi wisata tambang. Singkatnya, permasalahan ini adalah belum terintegrasikannya konsep

³⁰<https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/daerahkota-sawahlunto-dari-kota-tambang-menuju-kota-wisata> diakses pada Senin, 6 Januari 2025, jam 15:19 WIB.

³¹ Sehubungan dengan hal di atas penjelasan kepariwisataan Kota Sawahlunto belum memiliki efek yang ganda terhadap pendapatan kota masih menjadi realita dan tantangan. Berdasarkan data dari Dinas kepariwisataan Kota Sawahlunto terjadi penurunan terhadap kunjungan kepariwisataan terutama pada saat Pandemi Covid-19. Pada tahun 2018 dan awal 2019 terdapat masing-masing 290.920 dan 235.524 kunjungan kepariwisataan. Kisaran tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah kunjungan mengingat Kota Sawahlunto dinobatkan sebagai salah satu warisan dunia. Akan tetapi, pada tahun 2020 dan 2021 hanya terdapat masing-masing 95.995 dan 91.045 kunjungan. Sehubungan dengan itu keberadaan pandemi Covid-19 juga menjadi faktor penghalang minimnya jumlah kunjungan wisatawan. Untuk dapat lebih jelasnya silakan lihat data jumlah kunjungan lihat Sehubungan dengan hal di atas penjelasan kota Sawahlunto Sehubungan dengan hal di atas penjelasan kota Sawahlunto <https://sawahluntokota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjQxIzI=/kunjungan-wisatawan-nusantara-di-kota-sawahlunto.html> dan untuk penjelasan terkait Covid-19 lihat <https://www.rangkiangnagari.id/2020/04/pariwisata-sawahlunto-dapat-pukulan.html> diakses pada 6 Januari 2025 jam 15:30 WIB.

wisata tambang dengan wisata modern di Kota Sawahlunto.³² Kondisi demikian juga diakui oleh Wali Kota Kota Sawahlunto periode 2018-2023 yaitu Deri Asta. Dari keterangannya Deri Asta menyebutkan bahwa:

“...Kalau Gennta menanyakan terkait kondisi pariwisata kita dan hubungannya sama peningkatan ekonomi atau sama PAD kitalah tentu itu belum berdampak. Belum di sana main kita. Memang saya akui dampak pariwisata dengan kehidupan ekonomi masyarakat kita belum mempengaruhi. Tapi kalau untuk memenuhi apa yang sudah dituliskan dari Perda yang Gennta tanyakan tadi sama RPJP kita itu sudah terlaksana dengan baik. Sudah dicapai sesuai waktu yang telah ditargetkan di sana Gennta. (Wawancara dengan Deri Asta di Posko Pemenangan Kampanye Kampung Teleng, Selasa, 1 Oktober 2024, Jam 13:07 WIB).³³

Sehubungan dengan hal di atas, potensi wisata tambang dan budaya sebagai rohnya belum tereksplore oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Selain itu, dari sisi pemasaran juga belum optimalnya pemasaran wisata baik secara integral melalui koordinasi dengan pusat maupun promosi wisata melalui pameran di dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan yang masih didominasi oleh pengunjung lokal, atau setidaknya hanya daerah tetangga terdekat. Sawahlunto belum dijadikan destinasi utama karena potensi wisata yang belum diketahui oleh konsumen. Selain itu, terbatasnya infrastruktur dan sulitnya akses menuju beberapa objek wisata juga masih menjadi masalah dalam pengelolaan pariwisata. Peningkatan SDM dari segi pelaku pariwisata juga masih perlu ditingkatkan, untuk mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini. Hal tersebut yang menjadi tantangan pengembangan kepariwisataan berkelanjutan di Kota Sawahlunto.

³² Ibid, bagian IV 1-5

³³ Wawancara dengan Deri Asta di Posko Pemenangan Kampanye Kampung Teleng, Selasa, 1 Oktober 2024, Jam 13:07 WIB).

Tabel 1. 1
Kunjungan Kepariwisataaan Sawahlunto berdasarkan Objek Wisata Populer

No	Objek Wisata	Jumlah Kunjungan
1	Water Boom	38.692
2	Taman Satwa Kandi	34.507
3	Puncak Cemara	20.990

Sumber: diolah peneliti Tahun 2024 berdasarkan laporan BPS tahunan 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sektor pariwisata Kota Sawahlunto kondisi kepariwisataan kota Sawahlunto masih tergolong rendah. Pengembangan kota wisata tambang di Sawahlunto masih terbilang belum memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pembangunan daerah. Keberadaan kota tambang yang juga merupakan warisan dunia UNESCO ini secara optimal dilakukan pengembangannya. Pada sektor pariwisata, Kota Sawahlunto memiliki 67 rumah makan/restoran, di mana yang paling banyak berada di kecamatan Silungkang. Selain itu, terdapat 53 buah yang terdiri dari 2 hotel bintang, 5 hotel non bintang dan 46 akomodasi lainnya. Sebagai kota wisata, Kota Sawahlunto juga memiliki 20 tempat wisata. Pada tahun 2022, Kota Sawahlunto telah dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara. Tempat wisata yang paling banyak dikunjungi wisatawan adalah Water Boom sebanyak 38.692 pengunjung, diikuti dengan Taman Satwa Kandi sebanyak 34.507 pengunjung, dan Puncak Cemara sebanyak 20.990 pengunjung.³⁴

Terkait dengan transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto terdapat beberapa argumen peneliti yang dapat diidentifikasi dari fenomena yang ada, diantaranya; Pertama, realitas Kota Sawahlunto sebagai kota yang lahir dari komoditas

³⁴ Sawahlunto Dalam Angka 2023 (BPS)

pertambangan batu bara sejak era Kolonial Belanda. Kedua, kemunduran industri pertambangan yang ditandai dengan berhentinya proses pertambangan batu bara merupakan konsekuensi yang pasti akan terjadi. Sehingga terhentinya proses pertambangan ini akan berdampak kepada pendapatan dan keberlangsungan Kota Sawahlunto. Ketiga, akibat terhentinya proses pertambangan dan menjadi ancaman terhadap pendapatan kota, maka hal ini akan berdampak kepada ancaman menjadi kota hantu (*ghost city*). Keempat, transformasi terjadi ketika pemerintah dan seluruh elemen terkait di Kota Sawahlunto ketika mengubah kebijakan dalam hal ini visi dan misi kota.

Perubahan arah kebijakan ini ditandai dengan transformasi kota pertambangan menjadi kota pariwisata pertambangan dengan berbasis kebudayaan. Proses transformasi ini terjadi pada tahun 2001 ketika Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 yang mencanangkan Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya dengan target tahun 2020. Proses *kontinu* yang dapat dibuktikan keberlangsungannya hingga saat ini membuktikan bahwa transformasi kebijakan ini telah memberikan dampak signifikan bagi Kota Sawahlunto. Puncaknya dapat dilihat pada tahun 2019 ketika situs pertambangan batu bara Ombilin dinobatkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO.³⁵ Proses inilah yang menjadi dasar penelitian ini mengenai transformasi kebijakan yang didasarkan oleh penerapan *dynamic governance*.

³⁵ Sawahlunto telah mengikuti perjalanan yang sangat panjang terkait keberlangsungan kota. Kota ini sempat diprediksi akan menjadi kota mati atau kota hantu. Hal ini didasarkan dari aktivitas pertambangan batu bara yang dihentikan oleh PT BA ketika itu. Akan tetapi, pemerintah dan seluruh *stakeholders* tidak putus asa akan realitas yang ada. Transformasi kebijakan dibutuhkan sebagai respons untuk mempertahankan eksistensi dan keberlangsungan kota. Penjelasan lebih lanjut dapat dirujuk Delmira Syafrini. 2021. Transformation of a Coal Mining City into a Cultured Mining Heritage Tourism City in Sawahlunto, Indonesia: A Response to the Threat of Becoming a Ghost Town. *Tourism Planning & Development*, DOI: 10.1080/21568316.2020.1866653, hal 1-20

Penelitian ini mencoba melihat transformasi kebijakan sebagai wujud penerapan *dynamic governance* di Kota Sawahlunto. Sebagai kota pasca tambang, tentunya Sawahlunto memiliki beberapa rencana dalam pembangunannya untuk mengoptimalkan sektor pariwisata yang dipadukan oleh ciri khas kebudayaannya. Namun, dalam implementasinya di lapangan dampak pariwisata dan pengembangan belum memiliki kejelasan dan dampak yang cukup signifikan. Sebelumnya menurut RPJPD Kota Sawahlunto 2005-2025 dan berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 menyebutkan bahwa Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Hasil usaha ini terbukti pada tahun 2019 situs pertambangan batu bara Ombilin ditetapkan UNESCO sebagai *world heritage*.

Perubahan dari kota pertambangan menjadi kota wisata tambang (pasca tambang) ini memadukan dengan kebudayaan yang dimiliki merupakan ciri khas Kota Sawahlunto. Tentunya keberadaan kebijakan dan inovasi daerah menjadi tolak ukur keberhasilan dalam memanfaatkan potensi dan tantangan yang dimiliki. Melihat kepada RPJPD dan visi misi mengenai Kota Wisata Tambang yang Berbudaya tersebut ditargetkan pada tahun 2020. Terlepas dari kondisi dan perkembangan kota Sawahlunto saat ini terdapat juga beberapa pencapaian pemerintah dan seluruh *stakeholders* kota.³⁶ Namun, permasalahan bukan hanya terhenti ketika ditetapkannya situs pertambangan kolonial Belanda sebagai warisan dunia saja. Melainkan dibutuhkan sebuah inovasi yang tertuang di dalam keberlanjutan pembangunan kota yang berdasarkan kepada kondisi pemerintahan yang dinamis.

³⁶ Mengenai potensi dan dinamika kota Sawahlunto lihat opini Novendra Hidayat Menyongsong Sawahlunto Berkemajuan – Jurnal Sumbar diakses pada Selasa, 07 Mei 2024, jam 13:02

Penelitian ini memberikan sebuah kontribusi dalam penelitian mengenai *dynamic governance*. Terjadinya transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto mengenai pembangunan berbasis kepariwisataan berkelanjutan merupakan contoh dari penerapan *dynamic governance*. Mengusung tema sebagai transformasi kebijakan yang telah diterapkan, Sawahlunto bertransformasi dari kota tambang menjadi kota wisata tambang. Sebagai bentuk pemahaman mendalam dari *dynamic governance* berdasarkan kerangka kerja dari Neo & Chen, (2007) dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka kebaruan dalam penelitian ini terletak pada transformasi kebijakan.

Fokus penelitian ini akan melihat kepada analisis penerapan *dynamic governance* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto, khususnya pada aspek transformasi kebijakan. Kebijakan yang dimaksud adalah lewat visi kota pada tahun 2020 kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya. Berdasarkan kepada Perda Nomor 2 Tahun 2001 tersebut yang menjadi rujukan utama bagi pembangunan berkelanjutan di kota Sawahlunto. Berkaca kepada RPJP 2005-2025 Kota Sawahlunto dan komitmen pemerintah dan seluruh *stakeholders* dalam mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang yang berbudaya yang direncanakan pada tahun 2020.

Aspek dari visi kota tambang tersebut yang menjadi dasar utama peneliti dalam melihat sisi transformasi kebijakan di Kota Sawahlunto. Proses panjang yang juga dapat dilihat dari komitmen pemimpin politik di Kota Sawahlunto untuk mewujudkan kota wisata tambang tersebut merupakan bentuk dari penerapan *dynamic governance*. Sehingga dengan adanya keberlanjutan dalam arah pembangunan dan

komitmen para pemimpin telah membuktikan bahwa kebijakan yang berorientasi kepada kota wisata tambang telah menjadi kebijakan adaptif bagi Kota Sawahlunto. Visi kota Sawahlunto sebagai kota wisata tambang pada tahun 2020 menjadi dasar bagi peneliti dalam mengelaborasi lebih lanjut mengenai penerapan konsep *dynamic governance* oleh Neo & Chen (2007).

Konsep *dynamic governance* yang melihat sisi kecakapan pemerintah dalam mengantisipasi kemungkinan yang terjadi dapat dilihat dari instrumen pemerintah dalam menetapkan dan melakukan aspek pembangunan berkelanjutan. Kota Sawahlunto pada awalnya sebagai kota tambang sekarang bertransformasi menjadi kota wisata tambang merupakan penerapan aspek *dynamic governance*. Pemilihan kepada kebijakan yang berorientasi kepada kota pasca tambang ini juga menjadi salah satu aspek dalam keberlanjutan pembangunan di kota Sawahlunto.

Asumsi peneliti mengenai fenomena ini adalah terjadinya transformasi kebijakan kota Sawahlunto yaitu penerapan visi Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya merupakan bentuk dari penerapan *dynamic governance*. Penerapan *dynamic governance* ini juga didasarkan dari pengalaman kota dan keberlanjutan arah pembangunan kota, seperti komitmen pemimpin dan seluruh *stakeholders* kota dalam mewujudkan kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang pada tahun 2020. Selain itu penerapan dari konsep *dynamic governance* tersebut juga mengelaborasi sisi *thinking ahead*, *thinking across*, dan *thinking again* dari penerapan visi tersebut. Sehingga analisis yang dihasilkan komprehensif dan mendalam serta berfokus kepada penerapan *dynamic governance* dalam Visi Kota Sawahlunto menjadi kota wisata tambang yang berbudaya pada tahun 2020. Maka, rumusan

masalah dalam penelitian ini, bagaimana penerapan *dynamic governance* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto, terutama sejak ditetapkan menjadi kota warisan dunia UNESCO?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis dan menjelaskan perihal penerapan *dynamic governance* dalam pembangunan berkelanjutan kota pasca tambang di Kota Sawahlunto.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan menambah pustaka dibidang ilmu politik, khususnya pengembangan konsep *dynamic governance*. Terutama untuk menjelaskan sebuah penerapan *dynamic governance* dalam bentuk transformasi kebijakan. Penelitian ini juga akan menambah khazanah dalam tata kelola pemerintahan yang menekankan aspek pemerintahan dinamis di tengah kondisi lingkungan yang tidak menentu. Selain itu penelitian mengenai *dynamic governance* yang mengusung tema pembangunan berkelanjutan jarang dilakukan. Kontribusi akademis dalam penelitian ini bukan hanya menguraikan hasil penelitian, namun juga memberikan perspektif baru mengenai penerapan *dynamic governance*.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi wawasan baru bagi mahasiswa untuk melihat sisi lain dari *dynamic governance* yang diterapkan pada sebuah daerah. Tentunya ini juga memberikan semacam pengetahuan dan preferensi bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memahami sebuah tata kelola pemerintahan dinamis. Hal ini bermanfaat untuk menghasilkan sebuah kebijakan dan keputusan yang efektif, rasional dan adaptif dengan perubahan lingkungan. *Dynamic governance* secara praktis dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam membuat dan menyusun rekomendasi kebijakan. *Dynamic governance* jika diterapkan lebih lanjut oleh pemerintah sebagai pengambil kebijakan akan memberikan pemahaman mengenai tantangan masa depan yang ingin dicapai dan ditindaklanjuti.

